

PERAN JALALUDIN RAKHMAT SEBAGAI AKTOR DALAM PERJUANGAN HAK-HAK MINORITAS DI PARLEMEN

Hamdani Kurniawan^{1*}, Ari Ganjar Herdiansah², Husin Al-Banjari³

¹²³Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Indonesia

*Corresponding author: hamdani18001@mail.unpad.ac.id

Received: date; Accepted: date; Published: date

Abstract

Minority groups often get discriminatory treatment from the surrounding socio-political environment. Therefore, They always fight for their right through political path. This study examines the role of an actor in fighting for the minorities' right in parliament by highlighting the case of Jalaludin Rakhmat when he was a member of the House of Representatives Council in 2014-2019. The focus of this study is highlighting the political role of Jalaludin Rakhmat in fighting for the interests of the Syiah Group in the DPR, including describing the various dynamics along with it. The method used in this study is qualitative by collecting in depth-interview data with Jalaludin Rakhmat, several PDIP politicians, Syiah figures in West Java, and socio-political observers. The documents reading related to Jalaludin Rakhmat's activities in both scientific journals and national news was also carried out to deepen the context and issues of Syiah in Indonesia. The results of this study revealed that Jalaludin Rakhmat's role in legislative represents an actor-centered effort to intervene in the political process which aims to provide space for Syia groups to fulfill their various interests. However, from its political intervention efforts, it turned out that there were not many pro-Syiah policy products. The success of Jalaludin Rakhmat's intervention can not be determined only by the ability of the actor, but also by the political structure in the DPR. In addition, the identity attached to an actor also affects the success of his achievements in fulfilling his interests. Minority interest issues are still considered politically disadvantageous for political parties. This study concludes that minority actors who make it into parliament do not necessarily correlate with the opening of the political system to the struggle of minority groups.

Keywords : Actor centered; Politic of Identity; Minority Group

Abstrak

Kelompok minoritas seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dari lingkungan sosial politik di sekitarnya. Karena itu, mereka senantiasa berjuang memperoleh hak-haknya di antaranya melalui jalur politik. Penelitian ini menyoroti peran politik Jalaludin Rakhmat sebagai aktor dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok Syiah di DPR termasuk mendeskripsikan berbagai dinamika yang menyertainya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengambilan data wawancara mendalam terhadap Jalaludin Rakhmat, beberapa

politikus PDIP, tokoh-tokoh Syiah di Jawa Barat, dan pengamat sosial politik. Pembacaan dokumen terkait akhivitas Jalaludin Rakhmat baik di jurnal ilmiah dan berita nasional juga dilakukan untuk memperdalam konteks dan isu-isu Syiah di Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan Jalaludin Rakhmat berperan dalam mengintervensi pemberian ruang bagi kelompok Syiah dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Namun, upaya intervensi politik tersebut, ternyata tidak banyak produk kebijakan yang pro terhadap Syiah. Keberhasilan intervensi Jalaludin Rakhmat ternyata bukan hanya ditentukan oleh kemampuan aktor, melainkan ditentukan juga oleh struktur politik yang ada di DPR. Selain itu, identitas yang melekat pada diri aktor juga mempengaruhi keberhasilan capaian dalam memenuhi kepentingannya. Isu-isu kepentingan minoritas masih dianggap kurang menguntungkan secara politik bagi partai politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktor minoritas yang berhasil masuk ke parlemen tidak serta merta berkorelasi dengan terbukanya sistem politik bagi perjuangan kelompok minoritas.

Kata Kunci : Aktor Politik; Politik Identitas; Kelompok minoritas

Pendahuluan

Deklarasi Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi guna melindungi dan menjami hak-hak warga Negara merupakan hal yang fundamental. Tetapi pada realitasnya kelompok-kelompok yang merasa dirinya adalah kelompok minoritas justru merasa kehilangan dan terdistrosi untuk menjalankan hak-haknya sebagai warga negara akibat tekanan kelompok mayoritas. Kita bisa melihat bagaimana diskriminasi yang dirasakan oleh kelompok etnis Tionghoa yang dilarang memunculkan identitasnya dengan tidak boleh membuka sekolah berbasis Tionghoa, merayakan hari raya besar hingga diskriminasi untuk masuk ke kanal-kanal politik di era Soeharto. Kelompok lain semisal, kelompok kristen yang mengalami kekerasan melalui pelarangan untuk menjalankan ritual keagamaan, pembakaran rumah ibadah dan kesulitan mendirikan rumah ibadah. Dalam iklim demokrasi, perlindungan terhadap kelompok minoritas seharusnya berfungsi sebagai alat pendeteksi untuk bagaimana negara memberikan jaminan kepada warga negaranya agar dapat hidup dengan aman dan tenang tanpa tekanan dari kelompok mayoritas.

Maka dari itu pasca reformasi, salah satu perjuangan yang dilakukan oleh kelompok minoritas adalah melalui jalur politik struktural, dimana aktor-aktor komunitas/kelompok minoritas masuk ke partai politik dan berjuang di parlemen. Hasilnya adalah kelahiran UU NO 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang disahkan di DPR pada 11 Juli 2016.¹ Melalui peraturan tersebut dapat dipastikan

¹ Suryani dan Ana Sabhana Azmy, *Politik Identitas Dan Nasionalisme Kebangsaan Studi Atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tionghoa Di Indonesia Pasca Orde Baru*, Laporan Hasil Penelitian, (2016), hlm 21

bahwa pemerintah akan meniadakan produk hukum yang bersifat diskriminatif terhadap etnis Tionghoa. Contoh lainnya adalah kelompok Kristen. Kelompok kristen yang di wakili oleh Partai Damai Sejahtera (PDS) pada periode 2004-2009 mempunyai tujuan untuk menjaga kelompok mereka dari persoalan perusakan, penutupan, dan pembakaran rumah ibadah dan menolak segala peraturan perundang-perundangan yang dianggap menguntungkan kelompok Muslim.² Temuan dalam riset ini menyatakan jika PDS telah menolak dan menentang berbagai RUU Syariah yang berbentuk Undang-Undang yang dianggap hanya menguntungkan pihak Muslim seperti RUU Perbankan Syariah, RUU Jaminan Produk Halal RUU Zakat dan RUU Kesehatan.

Riset ini menyoroti kasus Jalaludin Rakhmat dari komunitas Syiah yang memperjuangkan hak-hak Syiah melalui partai politik di parlemen di periode 2014-2019. Pada pemilu 2014, Jalaludin Rakhmat sebagai perwakilan tokoh Syiah turut ikut serta dalam pemilu legislatif melalui PDIP sebagai kendaraan politiknya dan bersaing di dapil II DPR RI Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Tanggal 9 April 2014 Jalaludin Rakhmat berhasil mendapatkan kursi untuk duduk di Senayan dengan memperoleh 39.082 suara.³ Kemenangan ini membuat kelompok Syi'ah di Jawa Barat khususnya mendapat kekuatan tambahan untuk memperjuangkan hak-hak mereka di parlemen. Jalaludin Rakhmat di tempatkan di komisi VIII (sosial dan Agama) dengan membawa misi untuk melindungi kaum minoritas di Indonesia khususnya Kelompok muslim Syiah.⁴

Pemahaman Islam di Indonesia memiliki beragam macam karakter dan perbedaan yang terkadang acap kali menimbulkan perdebatan hingga konflik kekerasan antara penganutnya. Kasus yang sering terjadi adalah konflik antara Sunni dan Syiah. Faktor determinan yang mengarah kepada sentimen terhadap kelompok Syiah diawali dengan corak keislaman yang ada di Indonesia yang mayoritas bermazhab Sunni. Hal ini membawa sikap kewaspadaan terhadap pemahaman Syiah yang dianggap memiliki perbedaan fundamental dalam ajaran Islam. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan mengalami pemboikotan oleh Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS), yang mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi yang menolak adanya paham Syiah di Indonesia.⁵ Tidak hanya itu, mereka juga dipaksa untuk menandatangani perjanjian untuk tidak melakukan kegiatan

² M Imaduddin Nasution, "Demokrasi Dan Politik Minoritas." *Politica* 4, no. 2 (2013), hlm 372

³ Team Ijabi, "Ust Jalal_ Saya Lolos Ke Senayan Karena Punya Dua Sayap - Majulah IJABI.", (<http://www.majulah-ijabi.org/wawancara/ust-jalal-saya-lolos-ke-senayan-karena-punya-dua-sayap>), diakses pada tanggal 5 Desember 2020

⁴ Voa Islam, *Anggota DPR PDIP Syiah Jalaluddin Rahmat Berjanji Lindungi Kaum Minoritas* (<https://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/10/02/33183/anggota-dpr-pdip-syiah-jalaluddin-rahmat-berjanji-lindungi-kaum-minoritas/>), diakses pada tanggal 27 Desember 2020)

⁵ Redaksi ANNAS Indonesia, *PAS Jabar : Umat Islam wajib tolak perayaan hari asyura*, (<https://www.annasindonesia.com/read/1628-waspada-syiah-pas-jabar-umat-islam-wajib-tolak-perayaan-hari-asyura>), diakses 10 Desember 2020.

keagamaan seperti Asyuro karena dianggap sesat.⁶ Dengan hadirnya sikap intoleran terhadap kelompok minoritas sebuah Lembaga yaitu Setara Institute melakukan survei terhadap kehidupan beragama di Indonesia hasilnya, dalam 12 Tahun terakhir Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat intoleransi tertinggi di Indonesia, terutama dalam hal pelanggaran kebebasan dalam beragama.

Hasil penelitian terdahulu terkait hak minoritas dilakukan oleh Suprpto, peneliti mencoba melakukan pemetaan terkait relasi hak mayoritas muslim dan hak minoritas non muslim di Indonesia⁷. Di samping itu, penelitian Hasan mencoba memberikan pemaparan terkait permasalahan antara hak mayoritas-minoritas di Indonesia⁸. Penelitian lain tentang hak minoritas juga dilakukan oleh Nasution dimana penelitian ini menfokuskan pada politik minoritas Kristen dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam kehidupan berpolitik⁹. Sedangkan penelitian ini mencoba menjelaskan peran politik Jalaludin Rakhmat dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok Syiah di DPR sebagai kaum minoritas.

Jalaludin Rakhmat adalah salah satu tokoh cendekiawan di Indonesia yang berasal dari kelompok Syiah. Semasa hidupnya ia banyak berkontribusi bagi ekosistem intelektual melalui buku-bukunya antara lain Psikologi Komunikasi Psikologi Komunikasi¹⁰, Rekayasa Sosial: Reformasi Atau Revolusi, Psikologi Agama¹¹, Psikologi Agama¹² dan lain sebagainya. Selain dikenal sebagai seorang cendekiawan ia juga dikenal sebagai salah satu pendakwah yang konsen terhadap wacana-wacana plularisme sebagai upaya dalam menghilangkan stigma sesat kelompok Syiah di Indonesia melalui ceramah-ceramah, pengajian rutin yang dilaksanakan rutin di Muthahari atau menjadi narasumber dalam kajian-kajian ilmiah. Di sisi lain ia juga membangun Lembaga pendidikan Yayasan Muthahhari serta membangun jejaring sosial dengan kelompok lain seperti membentuk organisasi Majelis Ukhuwah Sunni Syiah (MUHSIN) di Jawa Barat pada tanggal 20 Mei 2011 dengan mengundang baik itu ormas islam, ataupun kepemudaan¹³.

Artikel ini berupaya menganalisis sejauh mana peran aktor, yang dalam hal ini diwakili oleh Jalaludin Rakhmat sebagai perwakilan kelompok Syiah dalam

⁶ Irfan Teguh, *Penolakan Peringatan Asyura di Bandung*, (<https://tirto.id/penolakan-peringatan-asyura-di-bandung-c1SR>), diakses pada tanggal 28 November 2020.

⁷ Suprpto, *Membina Relasi Damai antara Mayoritas Dan Minoritas. Analisis*, Volume XII, Nomor 1, Juni 2012

⁸ Hasbi Hasan (2012) *Islam, Negara Dan Hak-Hak Minoritas Di Indonesia. Analisis*, XII, (1), 1-18

⁹ M. Imaduddin Nasution. (2013) *Demokrasi Dan Politik Minoritas Di Indonesia. Politica*. 4 (2): 313-335

¹⁰ Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*. Edited (Bandung: Mizan, 2003)

¹¹ Jalaludin Rakhmat, *Rekayasa Sosial: Reformasi Atau Revolusi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999).

¹² Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Agama*. I (Bandung: Mizan, 2003).

¹³ Anik Farida, *Respon Organisasi Massa Islam Terhadap Syiah Di Bandung Jawa Barat.* PENAMAS 27, no. 2 (2014), hlm 169

memperjuangkan berbagai kebijakan atau produk legislatif yang mendukung kepentingan di DPR periode 2014-2019. Dalam analisisnya, artikel ini menggunakan konsep politik identitas sebagai perjuangan kekuasaan (*power struggle*) dan *actor-centered* dalam proses politik. Konsep aktor digunakan untuk mengukur sejauh mana *political Skill* seorang aktor yang berbasis pada *Knowledge* untuk memaksimalkan ketercapaian dalam memenuhi kepentingannya. Sedangkan teori politik identitas berguna dalam menganalisis bagaimana seorang aktor menggunakan identitasnya dalam perjuangan kekuasaan demi mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak mereka.

Metodologi

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melihat fenomena perjuangan kelompok Syiah sebagai bagian dari kelompok minoritas di parlemen. “Penggunaan metode penilitan deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan karena menekankan konstruksi logika dan penggalian interpretatif berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah penelitian ini”¹⁴. Oleh sebab itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini lebih kepada mensinkronkan, membandingkan serta mencari titik temu antara realitas empirik dengan teori. Data-data yang dibangun dalam argumentasi artikel ini dibangun melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menelusuri jurnal ilmiah, buku, berita-berita, dan wawancara langsung.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Jalaludin Rakhmat

Jalaludin Rakhmat adalah salah satu tokoh cendekiawan di Indonesia yang berasal dari kelompok Syiah. Dalam sejarah hidupnya ketertarikan terhadap ajaran Syiah terjadi pasca kemenangan revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khumaini pada tahun 1979. Kabar tersebut tiba di Indonesia bersamaan dengan masuknya paham-paham moderat yang diinisiasi oleh Ali Syariati, Ayatullah Khumaini, dan Murtadho Muthahari. Menurut Prof Zulkifli dalam bukunya *the sturggle of the shi'is in Indonesia* mengatakan jika Jalaludin Rakhmat menemukan titik balik pencariannya terhadap agama, intelektual dan spiritual secara garis besar ia temukan pada karya-karya tokoh Syiah yang dianggap menawarkan ideologi alternatif pandangan dunia.¹⁵ Pikiran-pikiran itu ia dapatkan ketika Bersama-sama Haidar Bagir dan Endang Saefudin Anshari diundang disebuah konferensi di

¹⁴ Noeng. Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pertama. (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990). hlm 66

¹⁵ Zulkifli. *The Struggle of the Shi'is in Indonesia* (The Australian National Universitu (ANU) Press, 2013), hlm 70

Kolombia pada tahun 1984. Dari sana ia bertemu dengan ulama-ulama Iran yang mempunyai keluasan ilmu-ilmu tasawuf dan merasa kagum pada mereka.

Mengingat ekspansi pemikiran Syiah pasca terjadinya revolusi Iran pada tahun 1979 ke Indonesia, maka pemerintah yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa maklumat untuk berwaspada terhadap paham Syiah tahun 1984.¹⁶ Hingga saat ini stigma negatif yang disematkan kepada kelompok Syiah masih tetap lestari seiring dengan hadirnya penolakan-penolakan dari kelompok anti Syiah khususnya di Jawa Barat.

Diskriminasi yang dialami oleh kelompok Syiah di Jawa Barat memang cukup mengawatirkan. Tindakan aksi massa dan pembokoitan sering dialami kelompok Syiah khususnya dalam perayaan ritual keagamaan. Garda terdepan pada kejadian tersebut mayoritas diinisiasi oleh kelompok Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) yang menolak keberadaan paham Syiah di Indonesia. Alasan mereka melakukan gerakan tersebut menurut Sekretaris pusat ANNAS adalah:

“Jika Syiah bukanlah Islam, aturan-aturan yang ada pada Syiah itu keluar dari nilai-nilai Islam seperti nikah muth’ab, rukun islam dan imannya berbeda dan masih banyak lagi. Oleh karenanya Syiah itu sesat dan menyesatkan. Mereka juga berbahaya bagi agama dan negara.”(wawancara dengan Tardjono Abu Muas pada 17 oktober 2020)

Maka dari itu mereka secara masif mencari relasi-relasi baik politik ataupun sosial yang bisa membantu dalam gerakan pembubaran Syiah di Indonesia. salah satu cara agar ANNAS mendapatkan atensi dari masyarakat ANNAS berusaha menggandeng kekuatan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia untuk terlibat secara langsung menghadapi kelompok muslim Syiah. Salah satu ormas Islam di Jawa Barat yang ikut dalam gerakan ANNAS adalah Persatuan Islam (PERSIS). Sebagai salah satu institusi agama terbesar di Jawa Barat PERSIS memiliki pengaruh kuat untuk menstigmatisasi umatnya terhadap ajaran Syiah. Dengan memperhatikan pengantar dari ketua umum PP Persis KH. Prof. DR. M. Abdurrahman, MA, Ketua dewan Hisbah KH.Usman Shalehuddin melalui Dewan Hisbah PP. Persatuan Islam Beristibath:Syiah merupakan agama/aliran sesat dan menyesatkan karena rukun islam dan rukun iman Syiah berbeda, memiliki aqidah yang menyimpang, Al-Qur’an yang asli masih berada pada Imam Mahdi, Hadist Sahih hanya keluar melalui Ali bin Abi Thalib.¹⁷

Peneliti coba merangkum penelitian yang dilakukan oleh litbang kementerian agama terkait dinamika Syiah di Indonesia untuk mengkomparasi data-data yang telah peneliti kumpulkan¹⁸. Dari 18 kota di seluruh Indonesia

¹⁶ MUI, *Fatwa Paham Syiah*, (<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/06.-Faham-Syiah.pdf>), diakses 20 Desember 2020

¹⁷ Tim aliansi Nasional Anti Syiah. *Fatwa-Fatwa Syiah Sesat* (Bandung: Aliansi Nasional Anti Syiah, 2018), hlm 72

¹⁸ Agus Mulyono dkk, *Dinamika Syiah Di Indonesia*, (Jakarta: Puslibatbang Kementerian Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017)

terdapat 4 kota di Jawa Barat yang menjadi objek penelitian yaitu Cirebon, Bogor, Garut dan Tasikmalaya. Dari semua penelitian tentang 4 kota ini, peneliti melihat bahwa yang menjadi garda terdepan dalam penolakan Syiah adalah ANNAS. Dan dari beberapa kota di Jawa Barat hanya Tasikmalaya yang masih memiliki ambang batas toleransi serta pihak pemerintah yang cepat tanggap melihat perosalan ini. Rekomendasi yang disarankan dalam penelitian ini adalah pemerintah dan MUI harus segera menentukan sikap dan membuat kajian-kajian tentang aliran Syiah.

Stigma negatif yang selama ini dialami oleh kelompok Syiah memunculkan gerakan penolakan yang disebut sebagai *resistance identity*. Menurut Castell terdapat tiga model pembentukan identitas yaitu: *pertama*, legitimasi identitas yang diartikan sebagai konstruksi identitas yang dibangun oleh penguasa melalui institusinya dengan melekatkan identitas tertentu pada seseorang atau kelompok. *Kedua*, *resistance identity* yaitu pemberian identitas oleh kelompok yang dominan kepada suatu kelompok yang hal tersebut memunculkan upaya penolakan hingga memunculkan langkah resistensi yang bertujuan untuk pengakuan publik atas identitas mereka. *Ketiga*, *project identity* yaitu konstruksi identitas yang dilakukan oleh aktor sosial yang berupaya memunculkan kembali identitas baru di masyarakat dengan gerakan-gerakan sosial yang dapat merubah struktur sosial.¹⁹ Model konstruksi identitas ini penting untuk dibahas karena berkaitan dengan kelompok-kelompok mana saja yang menggunakan politik identitas dalam memperjuangkan hak-haknya

konflik identitas menghadirkan pandangan terkait primodialisme yang berdampak terhadap kemunculan 2 aras yakni kelompok yang diakui dan tidak diakui kelompok yang dan yang lain.²⁰ Mereka yang diakui merasa memiliki dukungan karena memiliki persamaan identitas yang berimplikasi terhadap penguatan relasi atas dasar kesamaan. Sedangkan kelompok yang memiliki perbedaan akan merasa ditekan oleh kelompok yang sama. Kelompok yang merasa dipersekusi dalam hal ini kelompok Syiah melahirkan tindakan perlindungan diri dan survival atas hadirnya dominasi yang berupaya melahirkan kebencian-kebencian yang diproduksi secara massal. Identitas yang disematkan kepada Syiah bahwa Syiah adalah sesat merupakan konteks dimana terdapat semacam konstruk kelompok mayoritas kepada minoritas. Menurut Prof zulkifli dalam prolognya di dalam buku dinamika Syiah di Indonesia yang diterbitkan oleh Litbang Kementerian Agama mengatakan jika kelompok muslim Syiah menurut castell disebut sebagai bagian dari *resistance identity* karena proses konstruksi identitas kelompok Syiah selalu berkaitan dengan mayoritas Sunni. Hal ini lah yang membangun resistensi dan survival dari kelompok Syiah melalui

¹⁹ Castells, Manuel. *The Information Age: Economy, Society and Culture*, Vol. 2: *The Power of Identity*. Contemporary Sociology. Vol. 27. Blackwell Publishing, 2010. hlm 8

²⁰ Yogi Zul Fadli, *Kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM dan perlindungan hukumnya di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), (2014). hlm 335

seorang aktor untuk melawan logika dominasi yang ada. Hasil dari identitas resistensi ini adalah formasi komunitas Syiah, yakni komunitas resisten.²¹

Oleh karena itu untuk melawan gerakan-gerakan yang menyudutkan komunitas Syiah selain di bidang intelektual Jalaludin Rakhmat mencoba untuk bergerak dalam bidang sosial dan politik. Di bidang sosial salah satu tujuan dibentuknya IJABI (Ikatan Jama'ah Ahlul Bait Indonesia) adalah sebagai jembatan untuk menghubungkan komitmen IJABI dalam mencerahkan pemikiran umat serta pembelaan atas nasib kaum tertindas (*mustadh'afin*) dengan mayoritas paham Sunni yang ada di Indonesia. IJABI didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 2000, di Gedung Asia Afrika Kota Bandung.²²

Dalam gerakannya, IJABI mengusung slogan “Pembebasan dan Pencerahan” yang dituangkan dalam visinya yaitu menampilkan gerakan intelektual yang mencerahkan pemikiran Islam dan pembelaan terhadap *mustadh'afin*. Sebagai organisasi yang mengusung tema pembebasan dan pencerahan, IJABI memiliki karakteristik yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Perbedaan Karakteristik IJABI

Awal kelahiran	Muktamar 2016 IJABI
1. Tidak berpolitik	1. Islam Rasional dan Spiritual
2. Non-sektarian	2. Non Sektarianisme dan
3. Mengutamakan Akhlak	Dahulukan Akhlak di atas Fikih
4. Menjunjung Persaudaraan	3. Islam Pluralis
5. Mencerahkan Pemikiran	4. Islam Madani
	5. Pembelaan Terhadap Kaum Mustadh'afin

(Sumber: Diolah dari *Ijabi.or.id*)

Perbedaan signifikan terjadi pada poin 1 karakteristik IJABI yang mengganti kalimat “tidak berpolitik” menjadi “Islam rasional dan spiritual”. Pergantian ini dapat dilihat secara jelas tatkala Jalaludin Rakhmat berhasil menjadi anggota DPR RI. Secara tegas kelompok IJABI melihat jalur politik sebagai salah satu alternatif dari kebuntuan yang selama ini mereka rasakan khususnya dalam kehidupan beragama. Melalui penghapusan poin ini diharapkan perwakilan kelompok Syiah baik Jalaludin Rakhmat ataupun yang lainnya dapat membuat produk kebijakan-kebijakan yang selaras dengan kepentingan kelompok Syiah sebagai bagian dari kelompok minoritas.

Setelah membentuk organisasi resmi kelompok Syiah, tepatnya pada tahun 2008 ia melakukan proses komunikasi dengan antar kelompok atau

²¹ Bimas et al., *Dinamika Syiah Di Indonesia*. Hlm 6

²² Tim IJABI, “*Sejarah Ijabi*”, (<http://www.ijabi.or.id/tentang-kami.html>), diakses pada tanggal 17 Desember 2020

individu yang memiliki kesamaan nasib sebagai kelompok minoritas. Dari proses komunikasi tersebut Jalaludin Rakhmat membentuk suatu organisasi yang bernama Badan Koordinasi Forum Kebebasan Beragama (BKFKB) yang berisikan kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah, kelompok-kelompok Kristen, bahkan kelompok Baha'i yang tidak diakui di Indonesia. Jalaludin Rakhmat juga membuat organisasi yang bernama Majelis Ukhuwah Sunni-Syiah Indonesia (MUHSIN) pada tahun 2011 yang berawal dari kedatangannya ke Dewan Masjid Indonesia (DMI). Tepatnya pada tanggal 20 Mei 2011 Mushsin resmi dideklarasikan di Jakarta yang diprakarsai oleh IJABI dan DMI²³. Pendirian Muhsin sebenarnya merupakan langkah aliansi-aliansi yang pro terhadap keberadaan Syiah yang dapat dilihat sebagai upaya kelompok Syiah untuk menggalang solidaritas dari kelompok lain.

Melalui relasi sosial dengan kelompok-kelompok lain nyatanya gerakan sosial kegamaan yang dilakukan oleh Jalaludin Rakhmat masih terbatas kepada kelompok-kelompok yang mempunyai urgensi yang sama yaitu pembelaan terhadap hak kaum minoritas, demokrasi, dan nilai toleransi. Secara tegas peneliti dapat sampaikan jika gerakan ini belum menunjukkan hasil yang signifikan karena pada realitasnya kehidupan beragama kelompok muslim Syiah masih tetap mengalami penolakan-penolakan yang menciderai hak-hak mereka sebagai warga negara.

Setelah mengalami kebuntuan dalam bidang sosial, maka pada tahun 2014 Jalaludin Rakhmat menempuh jalur politik praktis melalui keikutsertaannya dalam pesta demokrasi yaitu pemilu legislatif. Ia menggunakan PDIP sebagai kendaraan politiknya untuk melaju pada pemilu 2014. PDIP menjadi partai pilihan Jalaludin Rakhmat karena merasa partai ini mempunyai sikap nasionalis dan pluralis. Pandangan lainnya juga muncul dari ketua Ahlul Bait Indonesia (ABI) tentang ketertarikan Jalaludin Rakhmat memilih PDIP sebagai perahunya, ia mengatakan :

“Saya menilai bahwa PDIP adalah pilihan yang strategis dari dua sisi. Pertama, tentu saja adalah faktor Jokowi yang diukung oleh PDI sebagai capres. Kemudian, sisi kedua adalah faktor PDIP sebagai partai nasionalis murni. Partai Islam tentu tak mungkin dijadikan sebagai kendaraan politik Ust Jalal dengan alasan2 yang jelas. Adapun di antara partai-partai nasionalis, PDIP tetap menjadi pilihan terbaik, dari sisi bahwa partai ini relatif belum di-infiltrasi oleh unsur-unsur Islam yang berideologi intoleran. Bahkan, partai ini dikenal cukup konsisten menyuarakan perlawanan terhadap intoleransi dan radikalisme.” (Wawancara dengan Otong Sulaeman, 21 November 2020)

Salah satu partai yang dianggap plural di Indonesia adalah PDIP. Alasannya karena partai ini mengusung ideologi yang berdasarkan Pancasila dan bersifat

²³ Anik Farida, *Respon Organisasi Massa Islam Terhadap Syiah Di Bandung Jawa Barat.* PENAMAS 27, no. 2 (2014), hlm 169

nasionalis juga tidak memiliki afiliasi kepada agama tertentu. Maka dari itu Jalaludin Rakhmat memilih PDI-Perjuangan sebagai kendaraan politiknya pada pemilu 2014. Secara faktual di dalam partai PDIP juga diisi oleh kelompok-kelompok minoritas seperti Tionghoa, Protestan, Katholik, Sunda Wiwitan dan berbagai macam kelompok minoritas lainnya walaupun secara khusus PDIP tidak menyediakan kursi untuk kelompok minoritas. Menurut mantan Sekretaris Jenderal DPW PDIP Abdy Yuhana terkait Jalaludin Rakhmat:

“Secara pribadi Kang Jalal adalah orang yang bagus, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PDIP dan komunikasinya juga baik. Untuk permasalahan bahwa Kang Jalal adalah Syiah kita secara kelembagaan PDIP tidak menjadikan itu sebuah permasalahan karena terdapat amanat UU yang menyatakan bahwa semua orang bebas memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agamanya. Dan yang paling penting di PDIP semua orang diperlakukan sama tidak ada kelompok mayoritas dan minoritas.”(Wawancara dengan Abdy Yuhana, 23 Oktober 2020)

Jalaludin Rakhmat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada tahun 2014 di daerah pemilihan (dapil) II Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Slogan kampanye yang diusung adalah Kiai membela rakyat kecil, gerakan kampanye yang dimunculkan adalah mengadakan dan mengisi pengajian-pengajian, membantu pesantren yang membutuhkan dan menyumbang Al-Qur’an ke masjid-masjid. Setelah proses kampanye berakhir pada tanggal 5 April 2014, Jalaludin Rakhmat berhasil meraih suara 39.082 dan sukses untuk mengamankan satu kursi di parlemen. Jerih payahnya ini juga sekaligus menjadi tantangan baru untuk membawa perubahan-perubahan yang sesuai ia harapkan. Saat ini Pertanyaan fundamental yang harus dijawab adalah apa yang melatarbelakangi Jalaludin Rakhmat menjadi anggota dewan, Dari hasil wawancara peneliti, ia mengungkapkan:

“Hal yang melatarbelakangi saya untuk menjadi anggota dewan adalah karena kurangnya pembelaan terhadap kelompok minoritas (Syiah). Kita menghadapi kenyataan bahwa hukum itu ada, akan tetapi law inforcement nya tidak ada.”
(Wawancara dengan Jalaludin Rakhmat, 25 Oktober 2020)

Alasan yang dikemukakan Jalaludin Rakhmat berkaitan tentang *law inforcement* memang dirasa cukup tepat. Menurut, Prof Musdah Mulia jika aturan-aturan terkait perlindungan terhadap kelompok minoritas keagamaan di Indonesia telah memadai persoalannya hanya ada di level praksis saja²⁴. Level penerimaan terhadap keyakinan yang ada di Indonesia memang masih menjadi persoalan terutama dukungan negara dalam mendukung dan melindungi kelompok-kelompok minoritas. Maka dari itu

²⁴ Siti Musdah Mulia, “Potret Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia (Sebuah Refleksi Masa DepanKebangsaan Indonesia).” *Nusantara:Journal for Southest Asian Islamic Studies* 14, no. 2 (2018), hlm115

pencalonan Jalaludin Rakhmat sebagai anggota dewan dapat dilihat sebagai usaha untuk mempengaruhi negara dalam memperhatikan hak-hak kelompok minoritas dan memenuhi hak-haknya sebagaimana warga negara lainnya.

Dalam perkembangan khazanah ilmu politik, politik identitas merupakan bagian dari realitas yang muncul akibat konflik terkait hak asasi manusia. Model awal kemunculan politik identitas adalah “kesadaran Gerakan kulit hitam yang pertama kali muncul di abad kedua puluh yang diinspirasi oleh para aktivis seperti Marcus Garvey dan Martin Luther king yang mengambil bentuk perjuangan bagi hak-hak sipil di Amerika Serikat”.²⁵ Secara substantif, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan kelompok-kelompok yang didiskriminasi dan diambil hak-haknya oleh kelompok besar yang mendominasi didalam sebuah negara. Menurut Sri “politik identitas merupakan sebuah alat perjuangan politik bagi suatu kelompok yang mempunyai kesamaan dalam identitas untuk memenuhi kepentingan tertentu”²⁶ Kemunculannya disebabkan karena keberadaan faktor-faktor yang dipandang dapat menyebabkan ketidakadilan politik dan diskriminasi terhadap kelompok mereka. Dengan nada yang sama Andrew Heywood” mengatakan politik identitas dikaitkan dengan upaya-upaya memajukan kelompok-kelompok yang terpinggirkan, miskin atau tertindas”²⁷. Maka dari itu politik identitas sesungguhnya mengandung semangat keadilan, egalitarianisme dan plularisme yang dijadikan sebagai alat oleh kelompok-kelompok minoritas dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dalam proses menuju parlemen, kelompok Syiah berusaha untuk menye-laraskan kekuatan dalam suksesi pemenangan Jalaludin Rakhmat sebagai anggota DPR dengan mengoptimalkan suara penganut Syiah di dapil II Jawa Barat. Salah satu usaha yang dilakukan oleh internal kelompok Syiah adalah melalui Organisasi-organisasi yang mempunyai latar belakang Syiah seperti Ahlul Bait Indonesia (ABI) dan Ikatan Jama’ah ahlul Bait Indonesia (IJABI). Menurut ketua ABI Jawa Barat mengatakan:

“Sebagai ormas yang mengambil posisi netral dalam perhelatan politik di Indonesia, ABI tidak secara khusus memberikan rekomendasi agar para kader ABI memilih orang tertentu. ABI hanya memberikan kriteria terkait siapa yang layak untuk dipilih. Saya melihat bahwa untuk kawasan Dapil II Jawa Barat (daerah pemilihannya Ust Jalal) kriteria tersebut mengarah ke sosok Ust Jalal.” (Wawancara dengan Otong Sulaeman, 21 November 2020)

²⁵ Andrew Heywood, *Politik Global*. Edited by Ahmad Lintang Lazuardi. Kedua. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). Hlm 327

²⁶ Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. (Jakarta: yayasan Pustaka Obor, 2014). Hlm 20

²⁷ Andrew Heywood. *Pengantar Teori Politik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm 457

Organisasi-organisasi yang memiliki latar belakang pemahaman Syiah seperti IJABI dan ABI didirikan sebagai organisasi yang mengambil posisi netral dalam ekosistem politik di Indonesia. Tapi dengan keterlibatan Jalaludin Rakhmat di panggung politik praktis pada pemilu 2014 membuat organisasi ini mau tidak mau mengambil tindakan politis seperti mengarahkan para penganut Syiah yang ada di dapil II untuk memilih Jalaludin Rakhmat. Hal ini juga diamini oleh ketua PP IJABI yang mengatakan:

“Kita secara politik mengambil posisi netral, saya secara pribadi tidak menggunakan IJABI sebagai alat politik tapi saya menggunakan diri saya secara pribadi dan teman-teman saya untuk membantu ustad Jalal” (wawancara dengan Syamsuddin Baharuddin, 8 oktober 2020)

Oleh karena itu organisasi IJABI dan ABI tidak dapat melepaskan diri dari ekosistem politik yang ada karena pada dasarnya mereka kelompok Syiah ingin melakukan pembaharuan melalui kanal-kanal kekuasaan yang dirasa dapat memunculkan perubahan yang optimal. Dengan keterlibatan Jalaludin Rakhmat yang dikenal sebagai penganut Syiah, kelompok muslim Syiah berharap jika relasi yang dibangun nantinya akan mempermudah kehidupan mereka khususnya dalam kehidupan beragama.

Dengan keberhasilannya lolos ke parlemen, sebagai perwakilan kelompok minoritas, Syiah mempunyai energi baru untuk memperjuangkan hak-hak mereka melalui jalur politik. Melalui jalur ini Jalaludin Rakhmat bahwa ia berharap bisa membangun relasi dengan elit-elit politik yang dapat mengantarkannya kepada penyelesaian kelompok minoritas. Setelah berada di parlemen dalam fungsinya sebagai anggota legislatif, DPR memiliki banyak lembaga-lembaga yang menunjang kinerjanya sebagai badan legislasi di Indonesia. tercatat ada 10 Alat kelengkapan dewan yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Selama periode jabatannya sebagai anggota dewan, Jaludin Rakhmat mendapat kepercayaan untuk dapat duduk di beberapa AKD yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Tabel Jabatan Jalaludin Rakhmat sebagai Alat kelengkapan Dewan
Periode 2014-2019

Jabatan	Periode
Komisi VIII	2014-2019
Badan Legislasi (BALEG)	2014-2018
Panita Khusus (PANSUS)	2015-2019
	(RUU Minuman Beralkohol)
Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)	2018-2019

Sumber: diolah secara pribadi

Secara eksplisit, Jalaludin Rahmat merupakan aktor yang memegang peranan penting dalam ruang lingkup politik identitas. Menurut Habermas “jika aktor politik identitas adalah individu yang berada dalam satu entitas yang sama dalam pembentukan identitasnya”²⁸. Lebih lanjut, Habermas meyakini jika pembentukan identitas seseorang atau kelompok adalah berdasarkan tindakan komunikatif yang berimplikasi terhadap konsturksi identitas bersama. Dalam memahami teori aktor dalam politik identitas, Sofyan “memberikan gambaran bahwa aktor (baik berupa individu atau kelompok) memiliki tekanan yang dilimpahkan dari sturuktur di atasnya”²⁹. Akan tetapi yang perlu diinggat jika aktor mampu mengkonstruksikan kondisi yang ada sesuai dengan konteks kepentingan yang dimiliki setiap aktor. Penjelasan tersebut memunculkan tipologi yang disebut sebagai *aktor-sturuktur*. Maka, hubungan dinamis antara struktur dan agensi/aktor itulah yang harus kita upayakan untuk diinterogasi, dieksplorasi, dan akhirnya direfleksikan. Jalaludin Rahmat sebagai aktor politik identitas memiliki konteks kepentingan yang sesuai dengan realitas dan bertarung secara politis diparlemen untuk memenuhi kepentingan kelompok nya di parlemen.

Oleh karena itu dari semua jabatan yang ia peroleh di DPR khususnya sebagai Alat kelengkapan Dewan, tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap ekspektasinya dalam membuat produk-produk yang memihak kepada kelompok minoritas. Keinginannya untuk memproduksi kebijakan yang memihak kepada kelompok minoritas sangat didukung dengan duduknya Jalaludin Rakhmat di komisi VIII yang erat kaitannya pada bidang agama dan sosial. Selain itu melalui Badan legislatif yang dianggap sebagai kanal fundamental dalam menerbitkan Undang-Undang, diharapkan dirinya bisa menjalin relasi dengan elite-elite di parlemen sebagai upaya memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas khususnya kelompok muslim syiah agar menjadi lebih baik.

Manifestasi *Knowledge*: Peran Jalaludin Rakhmat Sebagai Strategi Aktor Politik Identitas

Knowledge dalam teori Colin Hay adalah perangkat seorang aktor untuk menentukan strategi dan taktik dalam memenuhi kepentingannya. Secara tidak langsung ini dapat dikatakan kemampuan/kapasitas aktor dalam memilih kemungkinan terwujudnya kepentingan melalui preferensi yang dia miliki. Dalam tulisan nya, Colin Hay menempatkan beberapa kali kata *knowledge* sebagai sandaran terhadap strategi³⁰. Dari hal itu peneliti melihat jika kata *knowledge* merupakan elemen yang penting bagaimana seorang aktor politik melihat atau mengidentifikasi dirinya untuk beradaptasi dengan ekosistem politik yang ada.

²⁸Sjaf, Sofyan. *Politik Etnik : Dinamika Politik Lokal Di Kendari*. (Jakarta: yayasan Pustaka Obor, 2014) .hlm 50

²⁹ *Idem*:54

³⁰ Colin Hay, “What Place for Ideas in the Structure-Agency Debate? Globalisation as a Process Without a Subject ” (2000).

Dalam *domain* nya sebagai aktor politik, seorang aktor memiliki tekanan yang dilimpahkan pada struktur yang melekat pada dirinya. Interpretasi terkait aktor dan struktur dalam studi ilmu politik telah menjadi sebuah perdebatan yang sejak dulu telah terjadi. Kelompok teori struktur menitikberatkan peran struktur dalam menentukan tindakan aktor, sebaliknya kelompok teori aktor mengatakan jika aktor tidak sepenuhnya diatur oleh struktur. Sebagai konsep, struktur adalah mekanisme yang difungsikan untuk membatasi gerak dan peran seseorang dalam sebuah ekosistem. Tapi disisi lain konsep aktor juga menandai apa-apa yang menjadi batas sebuah struktur. Seorang aktor memang mempunyai kapasitas untuk menentukan sejarahnya sendiri, akan tetapi kapasitas tersebut memiliki parameter yang berhubungan dengan konteks struktur mereka berada. Maka dari itu hubungan antara aktor dan struktur mempunyai keterkaitan satu sama lain.

Di Indonesia, dinamika politik yang terjadi mayoritas dikuasai oleh partai politik. Diskursus terkait aktor dan struktur mempunyai relasi yang kuat dalam memahami narasi dialektik politik identitas. Pasca reformasi, demokratisasi di Indonesia bangkit seiring dengan bermunculannya partai-partai yang ikut berperan dalam pemilu demokratis pertama di Indonesia. Partai-partai yang merasa dirinya sebagai bagian dari kelompok minoritas seperti partai etnis Tionghoa, Kristen, dan lain sebagainya mencoba memperjuangkan hak mereka melalui jalur parlemen. Akan tetapi seiring berjalannya waktu partai-partai kelompok minoritas kembali padam bersamaan dengan munculnya kebijakan tentang ambang batas parlemen. Untuk kembali ke parlemen, akhirnya kelompok-kelompok minoritas masuk kepartai-partai yang memiliki persentase suara yang sesuai dengan kebijakan ambang batas. Saat ini, partai politik yang didominasi oleh kelompok minoritas seperti Partai Damai Sejahtera (PDS) yang diisi oleh kelompok minoritas Kristen sudah tidak dapat memunculkan eksistensinya lagi di Indonesia. Implikasi yang ditimbulkan adalah peran dari aktor kelompok minoritas tidak memiliki keleluasaan dan cenderung dibatasi karena terbentur oleh ideologi partai ataupun kepentingan politik internal partai. Oleh sebab itu, kemampuan aktor kelompok minoritas untuk memenuhi kepentingannya sangat dipengaruhi oleh struktur yang berada pada dirinya dan kemungkinan terjadinya erosi terhadap hak-hak mereka semakin tidak dapat dihindari.

Sebagai seorang anggota DPR, Jalaludin Rakhmat berafiliasi dengan partai besar yaitu P-DIP sebagai alat politiknya kedepan. PDIP merupakan partai pemenang di Indonesia sejak 2014 dengan total suara yaitu 23.681.471 suara (18,95%)³¹ (Nasional.kompas.com, 2020). Untuk sebuah partai pemenang di Indonesia PDI-Perjuangan memiliki kursi terbanyak yang berjumlah 109 kursi yang tersebar di 11 komisi di tahun 2014. Sebagai salah satu anggota partai dari PDI-

³¹ Jessi Carina, *Perbandingan Suara Parpol 2014 dan 2019*, (<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/06353851/perbandingan-suara-parpol-2014-dan-2019-dari-yang-melejit-tersingkir-hingga?page=all>), diakses pada tanggal 15 Desember 2020

Perjuangan, Jalaludin Rakhmat terikat dengan aturan-aturan sebagaimana organisasi pada umumnya. Secara tidak langsung Jalaludin Rakhmat merupakan seorang aktor yang berada dibawah struktur. Artinya kepentingan-kepentingan dirinya yang menyebabkan apapun kepentingannya untuk masuk ke parlemen harus dibicarakan di internal partai.

Dalam perjalanannya sebagai anggota DPR Jalaludin Rakhmat menerima amanah untuk dapat duduk di komisi VIII yang membidangi persoalan Sosial dan Agama. Penempatan Jalaludin Rakhmat di komisi VIII oleh fraksi PDIP sesungguhnya selaras dengan kepentingan dirinya agar dapat membuat produk kebijakan yang memihak pada kelompok Syiah khususnya dalam kehidupan beragama. Namun diawal karirnya sebagai anggota DPR komisi VIII, ia mendapatkan *counter* gerakan dari kelompok-kelompok yang menolak keberadaan Syiah baik secara formal ataupun informal. Adapun langkah-langkah yang ditempuh secara informal oleh kelompok tersebut adalah menyebarkan Stigma negatif ajaran-ajaran Syiah di sesama anggota DPR sebagai upaya penolakan hadirnya Jalaludin Rakhmat di DPR khususnya di komisi VIII. Dalam sesi wawancara Jalaludin Rakhmat mengatakan:

“Mereka berpesan kepada kelompok lain hati-hati orang ini orang Syiah. Dilain kesempatan, mereka juga pernah berjuang untuk mengeluarkan saya dari komisi VIII, orang-orang dari fraksi dari PDIP sendiri cerita ke saya. Tapi kami dari PDIP akan tetap mempertahankan anda di komisi VIII” (Wawancara dengan Jalaludin Rakhmat, 25 Oktober 2020)

Sedangkan langkah-langkah formal yang ditempuh untuk menolak kehadiran Jalaludin Rakhmat salah satunya diinisiasi oleh ANNAS. Gerakan ini dipandang sebagai langkah untuk membendung gerakan Jalaludin Rakhmat di Parlemen karena dikhawatirkan akan menciptakan produk kebijakan yang akan menguntungkan pihak Syiah. Pertemuan antara ANNAS dan komisi VII ini dibenarkan oleh Hardian Tuasamu sebagai tenaga ahli Jalaludin Rakhmat sewaktu menjadi anggota dewan yang mengatakan :

“Pertemuan tersebut dibadiri oleh ANNAS dan dijabatani oleh salah satu fraksi. Isi dalam pertemuan tersebut adalah penghakiman yang ditujukan kepada Jalaludin Rakhmat dengan memaparkan kesesatan Syiah, dan itu sebetulnya tidak lazim diterima di DPR karena harus ada filter juga dari DPR.” (wawancara dengan Hardian Tuasamu, 7 November 2020)

ANNAS memiliki relasi politik yang dapat mereka manfaatkan untuk melakukan gerakan-gerakan penolakan terhadap kelompok Syiah. Adapun relasi-relasi politik yang dibangun, juga didasarkan atas pemahaman yang diseleraskan dengan pikiran-pikiran partai politik tertentu. Mengenai apa yang terjadi pada Jalaludin Rakhmat diatas, merupakan nestapa bagi kelompok minoritas untuk menjalani hak-haknya sebagai warga negara di Indonesia. Pengkultusan terhadap stigma negatif identitas Syiah nyatanya dijadikan kekuatan utama oleh mereka yang menolak keberadaan Syiah di parlemen untuk menarik simpati anggota DPR

lainnya agar berwaspada terhadap strategi dan gerakan Jalaludin Rakhmat di parlemen. Tapi di sisi lain, secara eksplisit Jalaludin Rakhmat berhasil menjalin relasi dengan PDIP dalam membangun kekuatan politik di Parlemen, terbukti dengan tetap dipertahankannya Jalaludin Rakhmat di komisi VIII.

Sebagai *playmaker* kelompok Syiah di Parlemen, Jalaludin Rakhmat memiliki kewajiban untuk menciptakan ruang agar kepentingan kelompok minoritas khususnya Syiah terpenuhi. Jalaludin Rakhmat ditunjuk untuk mengisi kursi kosong di Badan Legislasi atas perintah fraksinya yaitu PDIP. Sebagai salah satu anggota BALEG Jalaludin Rakhmat berhasil mengambil alih aturan Kementerian Agama tentang kebebasan beragama untuk diajukan ke BALEG menjadi Rancangan Undang-Undang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Penambahan kata berkeyakinan ini mengacu kepada kelompok-kelompok minoritas seperti Sunda Wiwitan, Kejawan dan lain sebagainya yang masih memegang teguh keyakinannya.

Perlu diketahui jika DPR memiliki hak untuk mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berdasarkan Undang-Undang MD3 nomor 17 tahun 2014 pasal 80 ayat a. Dengan kuasa ini, semua anggota DPR bisa memperjuangkan kepentingannya baik secara individu ataupun kelompok. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah narasi besar Jalaludin Rakhmat tentang ide untuk menghasilkan produk-produk kebijakan yang membela kelompok minoritas. Hal ini bisa dianalisa sebagai kemunculan persoalan-persoalan terkait struktur yang mulai meruak ketika ia telah membenamkan dirinya di panggung politik parlemen. Peneliti mencoba untuk menggali jauh lebih dalam melalui Tenaga ahli Jalaludin Rakhmat yang bersamanya selama 1 periode masa jabatannya sebagai anggota dewan yaitu Hardian Tuasamu. Dalam pengamatannya:

“Beliau masuk ke DPR dengan membawa narasi perlindungan kelompok minoritas khususnya Syiah, idealnya produksi-produksi kebijakan akan lebih mudah, tapi untuk kasus ustad Jalal memang susah. Karena dibutuhkan proses yang tidak mudah berkaitan dengan background yang beliau miliki.” (Wawancara dengan Hardian Tuasamu, 07 November 2020)

Terkait dengan rencana Jalaludin Rakhmat untuk menerbitkan aturan-aturan yang berpihak kepada kelompok minoritas, peneliti akan melihat produk-produk kebijakan yang dibuat oleh DPR sebagaimana fungsinya yaitu legislasi. Dari 12 RUU yang disahkan berdasarkan daftar prolegnas 2015-2019 ataupun 11 RUU yang disahkan berdasarkan komulatif terbuka tidak ada RUU yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan³² Adapaun terkait RUU ini memang dinilai memuat banyak kontroversi, seperti yang dikemukakan oleh Jayadi Damanik sebagai Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan berkeyakinan Komnas HAM dalam pertemuannya dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan jika isi draft RUU ini perlu ditinjau kembali, pertama definisi agama

³² *Memori Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019*.Dpr. (Jakarta), 2019. hlm 37

dalam draf RUU ini jika salah merumuskan akan menimbulkan potensi diskriminasi terhadap agama atau keyakinan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah. Kedua terkait perwakilan kelompok agama, dirinya khawatir kebebasan berorganisasi dalam Bergama sudah tidak dihargai, Islam misalnya, itu representasinya adalah NU, Kristen PGI. Ketiga terkait masalah pendirian rumah Ibadah itu materinya problematik³³. (Nasional.kompas.com, 2020)

Walaupun perjuangannya untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan kelompok minoritas gagal karena RUU tentang kebebasan beragama dan keyakinan tidak diterbitkan, tapi gerakan yang dibangun oleh Jalaludin Rakhmat bersama PDIP menghasilkan RUU kebebasan beragama dan berkeyakinan telah berhasil untuk diajukan di Baleg. Secara lugas Jalaludin Rakhmat mengatakan bahwa ia berpegang teguh pada misi fraksinya yaitu PDIP yang ia anggap juga PDIP membantu dalam memperjuangkan kelompok minoritas. Akan tetapi dalam perjalanannya, perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Jalaludin Rakhmat sebagai perwakilan kelompok minoritas terkadang dikesampingkan karena kepentingan politik. Sebagaimana yang Jalaludin Rakhmat katakan:

“Ketika saya bertanya perihal RUU kebebasan beragama, pihak fraksi biasanya menjawab jika situasi dan kondisi saat ini sedang tidak kondusif. Dan saya juga sampai akhir masa jabatan tidak mengetahui apa definisi kondusif yang dimaksud.”(Wawancara dengan Jalaludin Rakhmat, 25 Oktober 2020)

Makna kondusif yang dikatakan oleh Jalaludin Rakhmat merupakan sodoran kata yang memiliki banyak arti. Maka dari itu peneliti mencoba menggali lebih jauh terkait RUU kebebasan beragama dan berkeyakinan melalui Tenaga Ahlinya. Perubahan nama dari RUU Kebebasan Beragama menjadi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan disebabkan karena kelompok-kelompok minoritas beragama yang ada di Indonesia tidak masuk kedalam klasifikasi agama resmi di Indonesia. Isu tentang RUU ini yang mengandung kontroversi dibenarkan oleh Hardian tuasamu, yaitu :

“Memang isu RUU ini menjadi kontroversial, banyak sekali yang menolak semisal kelompok-kelompok penggiat HAM, ada juga beberapa partai politik yang tidak bisa saya sebutkan. penolakan ini muncul semisal tentang pendirian rumah ibadah. Tapi sebab terjadinya kontroversi karena draft awal mengenai RUU ini berasal dari Kementerian Agama, bukan dari pihak DPR. Adapun terkait RUU ini sebenarnya telah masuk kepada pembahasan, akan tetapi akibat kegaduhan, RUU ini masuk ke baleg dan masuk dalam kategori RUU jangka menengah bukan prioritas”(wawancara dengan Hardian Tuasamu, 7 November 2020)

³³ Luffy Mairizal Putra, *Menurut Komnas HAM, Draft RUU Perlindungan Umat Beragama Perlu Ditinjau Lagi*, (<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/23134321/menurut.komnas.ham.draf.ruu.perlindungan.umat.beragama.perlu.ditinjau.lagi?page=all>), diakses pada tanggal 29 Desember 2020

Jika makna kondusifitas adalah kegaduhan akibat diterbitkannya RUU ini, maka secara tidak langsung PDIP tidak cukup memberanikan diri untuk melangkah lebih jauh agar RUU ini dapat diproduksi. RUU ini sesungguhnya telah masuk ke dalam badan legislasi nasional sebagai bagian dari rancangan undang-undang yang akan di terbitkan. Tapi sayangnya kegaduhan yang disebabkan isi dari undang-undang tersebut membuat pembahasan RUU ini ditunda.

Kekecewaan yang dirasakan oleh Jalaludin Rakhmat adalah kegagalan untuk dapat menerbitkan produk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan kelompok minoritas khususnya kelompok muslim Syiah yang menjadi tujuan awal dirinya untuk masuk ke parlemen. Makna kekecewaan ini juga berasal dari sikap partai yang tidak mendukung secara penuh terkait RUU kebebasan beragama dan berkeyakinan Hingga akhirnya ia dipindahkan ke Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) oleh fraksi PDIP. Kekecewaan ini disampaikan oleh jalaludin Rakhmat yang mengatakan:

“Diujung masa akhir jabatan saya, saya dipindahkan ke BKSAP untuk diistirahatkan karena pekerjaan saya di badan legislasi cukup cape juga dan tidak terlalu kecewa juga, sampai akhir masa jabatan saya ada 130-an RUU yang harus diselesaikan. Di BKSAP saya dikirim keparlemen-parlemen luar negeri seperti iran dan tempat-tempat lainnya, dan saya juga menyuarakan suara-suara minoritas disana”. (wawancara dengan Jalaludin Rakhmat, 25 oktober 2020)

PDIP yang memiliki komunitas politik terbesar di parlemen sesungguhnya memiliki pengaruh terhadap signifikansi pemenuhan kepentingan kelompok minoritas. Melalui Jalaludin Rakhmat sebagai perwakilan kelompok minoritas diharapkan dapat memberikan jalan terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh kelompok minoritas dalam memperjuangkan hak konstitusional nya sebagai warga negara. Akan tetapi kepentingan politik yang disandarkan pada makna kondusifitas membuat Jalaludin Rakhmat juga tidak cukup tahu tentang kepentingan politik apa yang sedang diperjuangkan oleh PDIP hingga ujungnya RUU kebebasan beragama dan berkeyakinan ini tidak dapat diproduksi. Kepentingan seorang aktor Jalaludin Rakhmat dalam hal ini, sesungguhnya akan bersinggungan dengan kepentingan struktur yang berada di sekitarnya baik sturuktur parlemen ataupun struktur partai yang akhirnya kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kelompok minoritas cenderung dikalkulasikan sebagai kepentingan yang kecil.

Hal lainnya yang menjadi penting untuk dianalisa adalah jika identitas Syiah yang menempel pada dirinya juga menjadi faktor penting yang membuat kelompok-kelompok berpengaruh dalam politik cenderung enggan untuk berbicara lebih jauh mengenai kepentingan politik minoritas. Erosi politik yang dialami Jalaludin Rakhmat di parlemen juga sangat dipengaruhi dengan khidmat pemahaman Islam di Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh pemahaman Sunni. Maka dari itu identitas yang hadir merupakan penggambaran dari kekuatan yang dimiliki oleh sebuah kelompok yang sedang berusaha untuk melakukan perubahan sosial. Disini identitas tidak hanya dipahami sebagai simbol sosial saja, “akan tetapi identitas juga

menjadi sesuatu yang politis, yaitu berfungsi sebagai kekuatan politik yang mendorong perubahan sosial”. Dari sudut pandang ini kita dapat melihat pendikotmian Sunni sebagai kelompok mayoritas dan Syiah sebagai kelompok minoritas akhirnya menuntun kita kepada perbincangan terkait identitas dalam ekosistem politik justru menjadi semakin diskriminatif.

Dampak Peran Jalaludin Rakhmat sebagai Anggota Legislatif terhadap Kelompok Syiah di Jawa Barat

Jalaludin Rakhmat menjadi Anggota DPR pada tahun 2014-2019, sepanjang waktu 5 tahun ia berusaha untuk memenangkan pertarungan di parlemen demi terciptanya kesejahteraan bagi kelompok minoritas. Sebagai seorang aktor politik identitas, Jalaludin Rakhmat memiliki relasi kuasa dalam mekanismenya sebagai anggota DPR. Tentu saja kelompok Syiah mengharapkan Implikasi yang dimunculkan oleh Jalaludin Rakhmat akan memiliki dampak yang jelas bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya beberapa hal terkait acara-acara keagamaan yang harus dilaksanakan kelompok Syiah sebagai bagian dari penghambaan mereka kepada tuhan mereka masih menjadi persoalan besar bagi kelompok Syiah. Terkait dampak yang diperoleh oleh kelompok Syiah, Jalaludin Rakhmat mengatakan:

“Dampak yang jelas itu tidak ada, maksudnya dampak yang jelas itu bahwa masalah-masalah kelompok minoritas itu harus segera diatasi. Jangankan pengaruh saya pengaruh Presiden juga tidak ada, jangankan pengaruh saya pengaruh pemerintah tidak ada. Kami pernah berunding dengan 2 menteri sekaligus dan kami dari kelompok Syiah, Kementerian Agama waktu itu Pak SDA, dan kementerian dalam negeri mengeluarkan putusan terhadap perlindungan kelompok minoritas dan tidak ada tuh pelaksanaannya dilapangan dari keputusan Menteri itu. Tapi dari semua itu yang penting kan usaha. Maka dari itu kehadiran saya di DPR sepertinya tidak memberikan dampak yang jelas kepada kelompok minoritas.”(Wawancara dengan Jalaludin Rakhmat, 25 oktober 2020)

Serangkaian persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi lebih mudah ketika ia menjabat sebagai anggota DPR nyatanya memunculkan statement dari Jalaludin Rakhmat sendiri bahwa ia tidak memberikan dampak yang jelas kepada kelompok minoritas. Maka dari itu peneliti akan menganalisa keberhasilan dan kegagalan dari peran Jalaludin Rakhmat sebagai aktor dalam mengintervensi sistem politik di parlemen. Analisa keberhasilan dan kegagalan tersebut sesungguhnya berguna dalam melihat dampak yang ditimbulkan oleh dirinya terhadap kehidupan beragama komunitas Syiah di Jawa Barat.

Selama periodisasi Jalaludin Rakhmat menjadi anggota DPR, Kelompok-kelompok yang dianggap dapat membantu dirinya untuk memperbaiki kehidupan beragama kelompok Syiah, ternyata juga menemui jalan buntu. Jalaludin Rakhmat tentunya membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lain agar

pelaksanaan program yang ia usulkan dapat diperkuat oleh fraksi ataupun mitra kerja komisi VIII. Akan tetapi makna aktor sebagai pemeran utama yang hari ini diperankan olehnya tidak banyak memiliki banyak arti dalam perjuangannya untuk dapat menjalin relasi politik dengan elite penguasa. Terkait hal ini peneliti mewawancarai salah satu orang yang berada di lingkarannya ketika Jalaludin Rakhmat menjadi anggota DPR, ia mengatakan:

“Ada pengalaman ketika ustad Jalal ingin memperjuangkan dapilnya melalui program-program yang berhubungan dengan Kementerian Agama sebagai mitra kerja. Dalam pengusulan-pengusulan program pembangunan dapilnya, ada ungkapan dari beberapa oknum yang khawatir dan curiga, apakah bantuan ini diberikan kepada pesantren syiah atau milik syiah.”(wawancara dengan SN(bukan nama sebenarnya) pada 9 November 2020)

Legitimasi yang dikeluarkan oleh institusi negara seperti Kementerian Agama atau insititusi yang lainnya dapat mempengaruhi kehidupan kelompok minoritas secara signifikan. Alasannya, karena insititusi negara semisal kementerian agama memiliki afiliasi organisasi yang berpengaruh seperti MUI. Organisasi seperti MUI sesungguhnya memiliki pengaruh untuk bisa mengeluarkan fatwa terkait kelompok Syiah di Indonesia sehingga berimplikasi terhadap kehidupan damai beragama yang penuh dengan toleransi. Peran pemerintah dalam melindungi setiap kemerdekaan individu memilih keyakinan dan agama memang masih terkesan lemah. Hal ini juga yang menyebabkan kegiatan-kegiatan dari kelompok yang menolak hadirnya kelompok minoritas di Indonesia masih tetap menjalankan programnya walaupun bersifat diskriminatif. Terkait dengan hal ini Jalaludin Rakhmat dalam sesi wawancara mengatakan:

“Sebagai contoh kita pernah mengadakan acara yang dilangsungkan di dapil saya Kabupaten Bandung yaitu daerah Rancaekek yang bekerjasama dengan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan anak. Di acara tersebut saya mengundang organisasi perempuan Syiah yaitu Fathimiyah. Tetapi acara tersebut diminta oleh pihak kepolisian untuk dibubarkan dengan alasan kondusifitas, padahal acara itu mengantongi surat resmi dari pemerintah dan DPR.” (Wawancara dengan Jalaludin Rakhmat, 25 oktober 2020)

Dalam kasus kelomok Syiah, kelompok-kelompok seperti ANNAS yang memiliki kekuatan dalam menjalankan programnya untuk menolak ajaran Syiah di Indonesia masih tetap eksis dan terkadang mendapat dukungan dari pemerintah. Akan tetapi hal ini juga tidak dilepaskan dari peran kelompok syiah sendiri. Menurut data yang peneliti dapatkan melalui perwakilan kelompok ANNAS dan SYIAH seperti IJABI dan ABI komunikasi yang dibangun 2 kelompok ini memang terkesan lemah. Bentuk-bentuk kegiatan seperti dialog antara Syiah dan ANNAS memang belum pernah dilakukan. Selama periodesasi Jalaludin Rakhmat menjadi anggota DPR, karena disebabkan lemahnya komunikasi yang dibangun oleh dirinya kepada Lembaga-lembaga yang memiliki kaitan erat dengan kelompok Syiah, maka

kondusifitas yang harusnya dapat dijaga dengan mengandalkan powernya sebagai anggota DPR gagal diciptakan. Adapun terkait bagaimana dampak selama Jalaludin Rakhmat menjadi anggota DPR, peneliti menggali informasi dari kelompok ANNAS karena dirasa mempunyai relevansi terhadap gerakan-gerakan yang selama ini ANNAS lakukan untuk menolak Syiah. melalui juru bicaranya yaitu Tardjono Abu Muas mengatakan:

“Selama Jalaludin Rakhmat di DPR RI, ada beberapa peringatan-peringatan hari besar mereka masih berjalan karena Jalaludin mempunyai relasi untuk melobby pihak-pihak tertentu. Walaupun kita mendapatkan sedikit kesulitan, kita masih tetap mengajak pihak aparat, camat, lurah untuk menolak kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan ini loh acara Syiah tolong dibubarkan.” (wawancara dengan Tardjono Abu Muas, 17 Oktober 2020)

Untuk menganalisa lebih dalam terkait dampak apa yang terjadi di Jawa Barat, peneliti mencoba mendalami dari hasil data yang peneliti peroleh melalui berbagai sumber. Salah satu narasumber yang memiliki kredibilitas yang dapat menjelaskan dampak terhadap kelompok Syiah adalah Pengurus Pusat IJABI. Menurut Ketua PP IJABI ia mengungkapkan:

“Selama perodesasi Ustad Jalal menjadi anggota DPR, kami merasa serangan-serangan kepada kelompok minoritas intensitas semakin masif, rangkaian kegiatan yang kita lakukan seperti hari-hari besar Syiah masih ada kelompok-kelompok intoleran yang mencoba membubarkan kami lewat aksi massa.” (wawancara dengan Syamsuddin Baharuddin, 25 Oktober 2020)

Capaian-capaian Jalaludin Rakhmat ketika di parlemen yang berkaitan dengan dampak kepada kelompok minoritas khususnya kelompok minoritas muslim Syiah di Jawa Barat masih belum terlihat. Dari beberapa sumber berita online yang peneliti dapatkan sepanjang 2014-2019, memang masih terus bermunculan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok anti Syiah dalam mencegah perayaan-perayaan hari besar Syiah yang selalu datang sebelum Jalaludin Rakhmat menjadi anggota DPR. Hal ini merupakan salah satu indikator sederhana untuk mengetahui bagaimana dampak kehidupan beragama kelompok muslim Syiah selama perodesasi Jalaludin Rakhmat menjadi anggota DPR tidak semakin membaik. Untuk mengetahui lebih lanjut hal ini, menurut narasumber yang tidak ingin dituliskan namanya mengatakan:

“Jadi kalo saya sederhana parameternya, sebelum ustad jalal menjadi anggota DPR orang-orang Syiah mengalami kesulitan untuk menjalani kegiatan-kegiatan seperti perayaan As-Syuro. Setelah Ustad Jalal menjadi anggota DPR apakah itu berubah, ternyata selama perodesasi beliau menjadi anggota DPR tidak menjadi lebih baik.” (wawancara dengan KS (bukan nama yang sebenarnya) 30 Oktober 2020)

Komplektisitas hal yang dihadapi oleh kelompok Syiah saat keberhasilan Jalaludin Rakhmat menjabat sebagai anggota DPR juga tidak menjadi angin

segar bagi kelompok Syiah yang berharap dengan hadirnya Jalaludin Rakhmat di parlemen dapat membuat kegiatan-kegiatan keagamaan dapat dijalankan dengan damai. Dari semua persoalan yang terjadi selama periodisasi Jalaludin Rakhmat menjabat sebagai anggota DPR, mayoritas kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok Syiah di Jawa Barat banyak mengalami persekusi terkhusus kegiatan-kegiatan yang mengandung ritus keagamaan. Relasi politik yang dibangun oleh Jalaludin Rakhmat salah satunya partai politik yakni PDIP untuk membantu proses pemenuhan kepentingannya dalam memperjuangkan hak-hak Syiah juga terkesan tidak efektif. Kegagalan dalam proses politik yang dijalani Jalaludin Rakhmat untuk mengintervensi sistem politik di parlemen menyebabkan kehidupan kelompok Syiah khususnya di Jawa Barat mengalami stagnanisasi. Oleh sebab itu kegagalan atau keberhasilan perjalanan seorang aktor memenuhi kepentingannya sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh struktur yang berada pada dirinya. Dan jika seorang aktor tersebut memiliki sebuah identitas tertentu, maka bisa jadi identitas tersebut menjadi faktor keberhasilannya atau bahkan menjadi hambatan bagi dirinya untuk mencapai tujuan.

Kesimpulan

Kehidupan politik kelompok minoritas sesungguhnya masih menjadi persoalan dalam ekosistem demokrasi di Indonesia. Kegagalan untuk dapat memproduksi kebijakan yang berpihak terhadap kelompok Syiah dapat ditinjau dari 2 hal, *pertama* strategi yang dibangun dalam upaya mengintervensi struktur politik yang ada di parlemen baik partai politik ataupun elite-elite politik yang bertumpu pada *political skill* dan diasosiasikan sebagai *knowledge* masih terkesan lemah. *Kedua*, identitas sebagai penganut Syiah yang melekat pada dirinya menjadi kendala dalam kehidupan politik Jalaludin Rakhmat sehingga berimplikasi terhadap pembangunan relasi politik dirinya di Parlemen. Kegagalan ini menjadi faktor determinan bagi kelompok Syiah di Jawa Barat bahwa kehidupan mereka dalam menjalankan ritus peribadatan tidak semakin membaik. Salah satu indikatornya adalah gerakan-gerakan seperti aksi massa dan kajian-kajian mengenai paham Syiah yang di galakan kelompok-kelompok anti Syiah justru semakin massif dan membuat kelompok Syiah di Jawa Barat semakin terdiskreditkan.

Daftar Pustaka

- Andrew, Heywood. *Pengantar Teori Politik*. Edited by Setiyawati E and Rahmat Fajar. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bimas, Puslitbang, Agama Dan, Layanan Keagamaan, Badan Litbang, D A N Diklat, and Kementerian Agama. *Dinamika Syiah Di Indonesia*. Edited by Ubaidillah. Jakarta: Puslibatbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2017.
- Buchari, Sri Astuti. *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor, 2014.

- Castells, Manuel. *The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. 2: The Power of Identity. Contemporary Sociology*. Vol. 27. Blackwell Publishing, 2010.
- DPR. “Buku Memori Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019.” *Dpr* (2019): 1–30.
- Fadhli, Y. Z. (2014). *Kedudukan kelompok minoritas dalam perspektif HAM dan perlindungan hukumnya di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 352–370.
- Farida, Anik. (2014) “Respon Organisasi Massa Islam Terhadap Syiah Di Bandung Jawa Barat.” *Penamas*. 27,(2): 159–175.
- Hay, Colin. “What Place for Ideas in the Structure-Agency Debate? Globalisation as a 'Process Without a Subject' ” (2000).
- Hasan, Hasbi (2012) *Islam, Negara Dan Hak-Hak Minoritas Di Indonesia. Analisis*, XII, (1), 1-18
- Ijabi, Team. “Ust Jalal_ Saya Lolos Ke Senayan Karena Punya Dua Sayap - Majalah IJABI.”
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pertama. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.
- Nasution, M Imaduddin. “Demokrasi Dan Politik Minoritas.” *Politica* 4, no. 2 (2013): 313–335.
- Rakhmat, Jalaludin. *Psikologi Agama*. I. Bandung: Mizan, 2003.
- . *Psikologi Komunikasi*. Edited by Jalaludin Rakhmat. 1st ed. Bandung: Mizan, 2003.
- . *Rekayasa Sosial : Reformasi Atau Revolusi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Sjaf, Sofyan. *Politik Etnik : Dinamika Politik Lokal Di Kendari*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor, 2014.
- Suprpto, (2012) Membina Relasi Damai antara Mayoritas Dan Minoritas. *Analisis*, XII (1), 19-48
- Suryani, and Ana Sabhana Azmy. “Politik Identitas Dan Nasionalisme Kebangsaan (Studi Atas Penguatan Politik Identitas Etnis Tionghoa Di Indonesia Pasca Orde Baru).” *Laporan Hasil Penelitian* (2016).
- Syiah, Tim aliansi Nasional Anti. *Fatwa-Fatwa Syiah Sesat*. Edited by Tim Aliansi Nasional Anti Syiah. Bandung: Aliansi Nasional Anti Syiah, 2018.
- Zulkifli. *The Struggle of the Shi'is in Indonesia*. 1st ed. Australia: The Australian National University (ANU) Press, 2013.

Sumber Wawancara

- Baharuddin, Syamsuddin wawancara oleh Hamdani Kurniawan. Bandung via zoom meeting. Tanggal 8 Oktober dan 25 Oktober 2020.
- KS(bukan nama sebenarnya) wawancara oleh Hamdani Kurniawan. Tanggal 30 Oktober 2020.
- Rakhmat, Jalaludin wawancara oleh Hamdani Kurniawan. Bandung via zoom meeting. Tanggal 25 Oktober 2020

- Sulaeman, Otong wawancara tertulis oleh Hamdani Kurniawan. Tanggal 21 November 2020.
- SN (bukan nama sebenarnya) wawancara oleh Hamdani Kurniawan. Tanggal 9 November 2020.
- Tuasamu, Hardian wawancara oleh Hamdani Kurniawan. Jakarta via zoom meeting. Tanggal 7 November 2020.
- Tardjono, Abu Muas oleh Hamdani Kurniawan. Sekretariat Pusat Aliansi Nasiona Anti Syiah (ANNAS) Bandung. Tanggal 17 Oktober 2020.
- Yuhana, Abdy wawancara oleh Hamdani Kurniawan. Bandung, Gedung DPRD Jawa Barat. Tanggal; 23 Oktober 2020.

Sumber Media Elektronik

- Tim redaksi ANNAS, *Penolakan terhadap Syiah oleh ANNAS*, (<https://www.annasindonesia.com/read/1628-waspada-syiah-pas-jabar-umat-islam-wajib-tolak-perayaan-hari-asyura>), diakses 10 Desember 2020.
- Penolakan Terhadap Syiah Di Bandung*, (<https://tirto.id/penolakan-peringatan-asyura-di-bandung-c1SR>), diakses 28 November 2020.
- Kemenangan Jalaludin Rakhmat pada pemilu 2014*, (<http://www.majulah-ijabi.org/wawancara/ust-jalal-saya-lolos-ke-senayan-karena-punya-dua-sayap>), diakses 5 Desember 2020.
- Hasil Survei Setara Institute*, (<https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-pelanggaran-kebebasan-beragama-terbanyak-di-jawa-barat/5162242.html>), 15 Desember 2020.
- Fatwa terhadap paham Syiah oleh MUI*, (<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/06.-Faham-Syiah.pdf>), diakses 20 Desember 2020
- Sejarah IJABI*, (<http://www.ijabi.or.id/tentang-kami.html>), diakses 17 Desember 2020.
- Perbandingan suara Partai politik 2014 dan 2019*, (<https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/06353851/perbandingan-suara-parpol-2014-dan-2019-dari-yang-melejit-tersingkir-hingga?Page=all>), diakses 18 Desember 2020.
- Menurut Komnas HAM, Draf RUU Perlindungan Umat Beragama Perlu Ditinjau Lagi*, (<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/23134321/menurut.komnas.ham.draf.ruu.perlindungan.umat.beragama.perlu.ditinjau.lagi?page=all>), diakses pada tanggal 29 Desember 2020
- Luffy Mairizal Putra, *Menurut Komnas HAM, Draf RUU Perlindungan Umat Beragama Perlu Ditinjau Lagi*, (<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/05/23134321/menurut.komnas.ham.draf.ruu.perlindungan.umat.beragama.perlu.ditinjau.lagi?page=all>), diakses pada tanggal 29 Desember 2020



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

